

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG KEWAJIBAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS
(*Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang*)**

JURNAL

**Diajukan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**

Oleh :

MOHAMAD ADI

NIM. 0810113311



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

PENDAHULUAN

Analisis Dampak Lalu Lintas atau yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Di dalam pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan terpenuhinya hak atas lingkungan yang sehat, oleh karena itu setiap pembangunan suatu kegiatan baik skala besar maupun skala kecil haruslah memiliki izin.

Dimana izin tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Melihat perkembangan kehidupan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang ada saat ini cukup pesat sehingga memerlukan pengaturan-pengaturan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkannya. Untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya izin analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan.

Dampak Lalu Lintas sendiri memiliki arti sendiri, yaitu pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan. Hal ini ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan Analisis dampak lalu lintas tersebut, dibentuk tim Analisis dampak lalu lintas yang dibentuk oleh Walikota yang susunan keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Andalalin¹. Tim sebagaimana dimaksud minimal beranggotakan dari unsur Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan yang telah ditandatangani, antara lain dapat berupa (i) peringatan tertulis (ii) penghentian sementara pelayanan umum (iii) penghentian sementara kegiatan (iv) denda administratif (v) pembatalan izin dan/atau (vi) pencabutan izin.

Masih banyak praktek-praktek dalam hal pelayanan perizinan yang tidak memenuhi prosedur hukum yang sudah ditentukan. Seperti halnya pembangunan berdirinya apartemen Jalan Soekarno-Hatta yang tanpa melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas telah mendapatkan IMB, juga Contoh lain adalah Ruko (rumah toko) Soekarno Hatta Indah Blimbing yang masih dalam tahap penyelesaian akhir. Dalam proses pembangunannya membutuhkan lahan yang luas serta lahan parkir yang dapat dikatakan cukup sempit jika tarikan pengunjung banyak. Hal itulah yang dapat menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Ruko Soekarno Hatta Indah Blimbing tersebut berpotensi terjadi kemacetan.

Karena itulah perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan atau pedoman atas analisis dampak pembangunan kawasan perkotaan dan gedung pemerintah. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dapat tetap dipertahankan ditengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin

¹ Salinan No. 4/E, 2010 Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang **Analisis Dampak Lalu Lintas**

pesat. Seperti keadaan di kota Malang akhir-akhir ini yang mulai menimbulkan kemacetan lalu lintas yang diakibatkan tarikan lalu lintas dari jalan disebabkan adanya pusat kegiatan atau usaha yang didirikan tanpa memperhatikan prosedur hukum dalam mendirikan suatu pusat kegiatan atau usaha. Terutama apabila dari pihak pengembang atau pengusaha sendiri tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum di lingkup kota Malang ini masih perlu diperbaiki dan perlu adanya penegakan hukum yang sifatnya riil.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 2 Ayat 1 tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas ?
2. Apa kendala yang dihadapi instansi terkait dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas?
3. Apa solusi yang harus diupayakan instansi terkait dengan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas agar tidak terhambat?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat 1 tentang kewajiban pengembang dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

2. Mengetahui dan menganalisis hambatan atau kendala dalam menerapkan Peraturan Daerah kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dalam Pasal 2 Ayat 1 tentang kewajiban pengembang/pengusaha dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
3. Untuk merumuskan upaya yang disarankan pada pelaksana Peraturan Daerah tersebut agar setiap pembangunan dapat terlaksana sesuai prosedur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dilihat dari latar belakang obyek penelitian dan instrumen-instrumen yang mendukung serta penyesuaian dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian yang diteliti oleh penulis dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris. Yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan yang berlaku, dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap masyarakat khususnya para pengembang/pengusaha.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Daerah Blimbing, Dinas Perhubungan Kota Malang. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena Lokasi kawasan yang dijadikan obyek penelitian dekat dengan pusat kota yang frekuensi lalu lintasnya relatif padat serta dipilihnya Dinas Perhubungan karena dinas tersebut yang berwenang mengeluarkan ijin Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) dan pada lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian ilmiah yang membahas tentang Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Pelaksanaan Pembangunan suatu kegiatan/usaha di Kota Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu serta Dinas Perhubungan Kota Malang serta pihak pengembang/pengusaha. Selain wawancara peneliti juga melakukan Observasi (pengamatan) yakni Pengamatan yang dilakukan difokuskan kepada pengamatan langsung untuk mengamati permasalahan-permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas

Pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan, Peraturan Daerah yang bersangkutan tidaklah sesuai harapan. Itu semua dapat dilihat dari tidak adanya kesinergian antara dinas-dinas yang berkaitan dengan Andalalin, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (DPU), BP2T, Badan SatpolPP, Badan Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan. Dan juga menurut sumber dari Kepala Sie Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, sejak diberlakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas dari tahun 2007 sampai sekarang dapat dihitung berapa bangunan yang sudah memiliki Andalalin. Yakni kurang lebih hanya sekitar 30 perusahaan yang mengurus Andalalin.²

Dalam hal ini, tidak semua bangunan / pengembang/pengusaha yang belum mengurus ijin Andalalin. Peneliti dapat memberikan contoh melalui narasumber yakni Bapak Oong selaku Kepala Sie Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang bahwa menurut beliau ada pengembang yang mematuhi tata cara mendirikan sebuah usaha/kegiatan dengan benar yakni Pembangunan Hotel Whitz yang berada di Jalan Basuki Rahmat, kota Malang yang sudah memiliki ijin Andalalin dan belum dilakukan pembangunan hotel yang bersangkutan³.

Hotel Whitz tersebut dari pihak pengembang sudah mengurus seluruh ijin baik dari DPU, BP2T, BLH, maupun Dishub. Menurut

² Hasil Wawancara dengan Kasie Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, pada tanggal 8 Oktober 2013

³ Hasil wawancara dengan narasumber, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang. Pada tanggal 8 Oktober 2013

narasumber, ijin Andalalin yang sesuai dengan aturan yakni bahwa sebelum ijin Andalalin dikeluarkan, harus tidak ada pembangunan yang bersifat fisik. Baru setelah ijin Andalalin dikeluarkan pihak pengembang/pengusaha dapat memulai pelaksanaan pembangunan bangunan yang bersangkutan.

B. Kendala Yang Dihadapi Instansi Terkait Dengan Diterapkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

Sejak diberlakukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, banyak masyarakat maupun para pengembang/ pengusaha yang masih belum mengetahui bahwa telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 terhadap pembangunan suatu bangunan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas. Peraturan Daerah tersebut semata-mata merupakan wujud dari bentuk penegakan hukum bagi masyarakat terlebih pada pihak pengembang/ pengusaha yang ingin mendirikan suatu bangunan dimana bangunan tersebut memiliki efek bangkitan arus lalu lintas yang dapat berdampak kemacetan jika tidak mematuhi aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pihak yang berwenang untuk memberikan ijin Andalalin pun juga tidak dapat bekerja dengan maksimal karena penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas bisa dianggap belum maksimal. Disamping itu Dinas Perhubungan yang bersangkutan bersifat pasif, dalam artian Dinas Perhubungan sendiri tidak bisa bergerak jika para pengembang/pengusaha tidak mengurus ijin Andalalin ke Dinas Perhubungan. Peneliti dapat membuktikan menurut

sumber yang di dapat yakni melalui Kepala Sie Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Oong.

Dari pernyataan bapak Oong, bahwa sejak dikeluarkannya andalalin tahun 2006 sampai sekarang keluar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010, total para pengembang/pengusaha yang telah mengurus/ mendapatkan ijin Andalalin hanya sekitar 30 perusahaan/bangunan saja.⁴ Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari penerapan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Pernyataan di atas didukung oleh pengembang Ruko Soekarno Hatta Indah Blimbing dan pengembang toko Sardo yang mana mereka menyatakan bahwa memang benar mereka belum tahu dengan adanya pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas yang mewajibkan Pengembang/pengusaha melakukan ijin Andalalin.

Tidak hanya itu dari pihak instansi-instansi terkait juga tidak saling ada komunikasi/ tidak saling bersinergi karena masing-masing instansi bekerja sendiri dan hanya melaksanakan sesuai apa yang ada pada bidang masing-masing. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang diteliti dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari hambatan internal serta hambatan eksternal.

Hambatan internal permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah tidak adanya kesinergian antara instansi-instansi yang terkait dalam ijin Andalalin yang menimbulkan kurangnya Andalalin itu sendiri dalam perkembangan pembangunan di Kota Malang. Serta rumitnya alur kepengurusan dalam mengurus ijin-ijin yang diperlukan untuk mendirikan suatu kegiatan/usaha.

Sedangkan untuk hambatan eksternal, menurut peneliti adalah penerapan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang

⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Sie Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang , pada tanggal 8 Oktober 2013

Analisis Dampak Lalu Lintas. Di samping itu, selain implementasi peraturan itu sendiri ada faktor lain yang menjadi hambatan yakni kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah yang bersangkutan pada masyarakat maupun para pengembang/pengusaha. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tidak adanya campur tangan pemerintah kota untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Serta minimnya usaha untuk lebih mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut padahal banyak media-media yang dapat digunakan sebagai proses sosialisasi adanya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tersebut.

Di sisi lain perkembangan pembangunan Kota Malang yang bertambah juga menjadi faktor kendala dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui dan memahami pentingnya mengurus Andalalin. Meski Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas tidak maksimal dalam penerapannya, akan tetapi dilihat dari kacamata hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya telah mengatur adanya wajib Andalalin, maka otomatis secara teori dari kota Sabang sampai Merauke di Indonesia berlaku Undang-Undang tersebut.

Maksud dari Peneliti adalah meskipun Peraturan Daerah yang telah ditetapkan belum optimal, maka jika ada Undang-Undang yang telah ditetapkan di atasnya, dalam hukum tetap wajib melakukan yang telah di atur di dalam pasal-pasal nya. Pernyataan peneliti didasari dengan teori hukum yakni “ *Lex Superior Derogat Legi Inferior*” bahwa Suatu Perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dapat mengesampingkan Perundang-undangan yang kedudukannya di bawah.

C. Solusi Yang Harus Diupayakan Agar Instansi Terkait Dengan Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas Tidak Terhambat

1. Solusi atas Hambatan Internal

Sejauh peneliti mengetahui bahwa setiap instansi yang terkait dalam ijin mendirikan suatu kegiatan/usaha bekerja secara individu tidak adanya saling komunikasi, itu yang menyebabkan tidak sedikit para pengembang/pengusaha yang sudah memiliki ijin amdal, namun untuk ijin andalalin tidak ada, ada juga yang sudah ada IMB pengembang langsung melaksanakan pembangunan, begitu juga sebaliknya. Dengan ketidaksinergian antar instansi inilah yang menjadi faktor minimnya andalalin yang dikeluarkan berbeda jauh dengan kondisi pembangunan di kota saat ini.

Untuk meminimalisir kendala di atas, peneliti dapat memberikan solusi bahwa agar pengembang/pengusaha dapat mendirikan suatu kegiatan/usaha, maka seharusnya dibuatkan sistem perijinan satu atap dimana dalam sistem itu terdapat kumpulan beberapa instansi yang terkait dengan ijin Advice Planning, ijin mendirikan bangunan, ijin AMDAL, ijin lingkungan serta ijin Andalalin itu sendiri. Dimana seluruh instansi-instansi terkait dengan ijin andalalin maupun ijin-ijin yang wajib diurus oleh pihak pengembang/pengusaha maupun warga yang ingin mendirikan usaha dapat mengikuti prosedur serta alur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Di samping itu, dapat mempermudah pihak pemohon mengurus proses ijin-ijin yang diperlukan agar andalalin dapat dikeluarkan. Pihak pemohon juga dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak harus bolak-balik ke instansi yang bersangkutan, selain efisien dengan sistem perijinan satu atap dapat memberikan solusi yang benar-benar dapat membantu jalannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

2. Solusi atas Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal dalam hal ini menyangkut tentang penyosialisasian Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Solusi untuk kendala dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010, peneliti dapat memberikan solusi seharusnya saat diberlakukan Peraturan Daerah tersebut dilakukan sosialisasi-sosialisasi lewat beberapa media yakni dengan cara dari sosialisasi melalui seminar-seminar yang diadakan oleh anggota DPR pada para pengembang/pengusaha maupun warga yang ingin mendirikan usaha dengan tujuan agar pengembang/pengusaha maupun warga yang berkeinginan mendirikan usaha mengetahui bahwa telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Selain itu, ada beberapa cara melalui penyebaran info di beberapa media cetak maupun media elektronik di website hukum kota Malang. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 menjadi salah satu penyebab kurangnya masyarakat maupun pengembang/pengusaha dalam memahami pentingnya ijin andalalin.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ijin Analisis Dampak Lalu Lintas diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang setelah adanya uji andalalin yang hasil andalalin tersebut yang dibentuk berupa dokumen andalalin. Namun implementasi aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 masih lemah maka dari itu, banyak para pengembang/pengusaha yang tidak memiliki ijin andalalin dalam melaksanakan pembangunannya.
2. Analisis Dampak Lalu Lintas dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas masih belum maksimal dalam penerapannya, dikarenakan beberapa faktor hambatan baik internal dari instansi-instansi yang bersangkutan, maupun dari hambatan eksternal dalam hal ini pihak pengembang/pengusaha maupun warga Malang yang masih belum mengetahui diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut.

Hambatan dalam pelaksanaan aturan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010:

A. Hambatan Internal:

1. Dari pihak instansi yang bersangkutan tidak adanya kesinergian antara instansi satu sama lain, kurangnya komunikasi dan arahan dari instansi pada para pengembang/pengusaha yang ingin mendirikan suatu kegiatan/usaha untuk mendapatkan ijin andalalin.
2. Instansi-instansi yang bersangkutan hanya melakukan apa yang para pengembang/ pengusaha mohonkan untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan untuk suatu kegiatan/usaha.

B. Hambatan Eksternal:

1. Kurang pahamnya para pengembang/pengusaha untuk mendirikan bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan/ usaha yang diwajibkan memiliki ijin andalalin.
2. Kurangnya perhatian dari pemerintah kota dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
3. Solusi atas Hambatan Internal dan Eksternal
 1. Solusi mengatasi hambatan internal:
 - a. Dibentuknya sistem perijinan satu atap agar memberikan kemudahan bagi para pengembang/pengusaha dalam mengurus ijin-ijin yang diperlukan dalam mendirikan bangunan, selain itu efisiennya waktu dan proses yang dibuat mudah.
 - b. Setiap instansi yang terkait dengan mendirikan bangunan memiliki kesamaan tujuan agar saling sinergi antar instansi satu sama lain.
 2. Solusi mengatasi hambatan eksternal:
 - a. Memberikan sosialisasi pada para pengembang/ pengusaha untuk mematuhi aturan dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, baik melalui seminar-seminar, maupun penyebaran info melalui media cetak ataupun media elektronik.
 - b. Dari pihak pemerintah kota agar lebih memajukan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas agar dapat lebih dimaksimalkan lagi yang tujuannya untuk kesejahteraan, kenyamanan, teratur dan tertib dalam hal pembangunan agar kemacetan dapat diminimalisir.

Saran

Dengan mengetahui hambatan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan dari peneliti adalah :

1. Bagi Pihak Pengembang/pengusaha yang akan mendirikan suatu kegiatan/usaha khususnya masuk dalam kriteria wajib andalalin, maka para pengembang/pengusaha dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu pada pihak-pihak bersangkutan terkait dalam mendirikan suatu kegiatan/usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Pihak-pihak yang dapat menjadi konsulator yakni dari instansi-instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, BP2T, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan. Konsultasi tersebut berfungsi sebagai parameter pengembang/pengusaha untuk mengetahui apa saja yang diwajibkan bagi pengembang/pengusaha untuk memenuhi syarat-syarat dalam mendirikan bangunan untuk suatu kegiatan/usaha serta otomatis aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas dapat terlaksana dengan maksimal untuk ke depannya.
2. Dalam segi pengawasan, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas harus lebih ditingkatkan lagi baik dari pihak pemerintah Kota Malang melalui instansi yang berwenang yakni Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku instansi yang berwenang untuk eksekusi dalam penegakan Peraturan Daerah yang telah diberlakukan. Untuk pengawasan itu sendiri diharapkan ke depannya agar lebih optimal dilaksanakan karena melihat kenyataan yang ada di lapangan bahwa Satpol PP selaku pihak yang berwenang dalam pengawasan tidaklah melakukan tugasnya dengan baik.

Satpol PP tidak melakukan pengawasan saat para pengembang/pengusaha melakukan pembangunan. Namun saat bangunan sudah terwujud secara fisik dan dinyatakan melanggar ketentuan, tidak mungkin untuk membongkar lagi bangunan tersebut. Maka dari itu, saran dari peneliti agar pengawasan lebih ditingkatkan lagi dan lebih optimal sejak mulai dibangunnya pembangunan yang masuk kriteria wajib Andalalin. Itu semua bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak pengembang/pengusaha dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 dapat berjalan dengan lancar untuk pembangunan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Salinan No. 4/E, 2010 Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2010 tentang

Analisis Dampak Lalu Lintas

Bab II Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010.

Hasil wawancara dengan narasumber, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas

Perhubungan Kota Malang.